

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yuli Kristina
Tempat/ Tanggal Lahir : Malang/ 13 Desember 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Simpang Candi Panggung 12 Malang
Nama Orang Tua : Ayah : Nari
Ibu : Juma'ati

Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri Mojolangu II di Malang, Jawa Timur (Lulus Tahun 1995)
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 di Malang, Jawa Timur (Lulus Tahun 1998)
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 di Malang, Jawa Timur (Lulus Tahun 2001)
4. Fakultas Hukum Universitas Widyagama di Malang, Jawa Timur (Lulus Tahun 2009)
5. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur (Lulus Tahun 2014)

RINGKASAN

Tesis ini menganalisa mengenai status hukum dan akibat hukum dari akta notaris yang dicatat dalam sela-sela kosong di antara akta notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta notaris.

Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah yang berawal dari adanya penyimpangan terhadap syarat formil dan materiil dari tata cara atau prosedur pembuatan akta notaris sehingga akta notaris yang seharusnya merupakan akta otentik menjadi akta Antidatir (pengosongan nomor dan tanggal pada akta sehingga nomor dan tanggal pada akta dapat dicantumkan nomor dan tanggal akta yang bukan sebenarnya). Selanjutnya dikaitkan dengan pentingnya akta notaris yang bertujuan untuk digunakan sebagai alat bukti yang sempurna, namun karena adanya pelanggaran terhadap Pasal 58 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2004 dapat memberikan peluang bagi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya uang hasil korupsi dibelikan tanah dan rumah di mana nomor dan tanggal akta dalam akta jual beli yang dibuat notaris tidak sesuai dengan tanggal yang sebenarnya, namun diganti dengan tanggal saat orang tersebut belum memiliki jabatan. Dalam hal ini akta yang dibuat notaris mengandung keterangan palsu. Padahal kewenangan notaris yang diberikan oleh undang-undang memiliki peranan yang penting dalam pembuatan akta. Peranan tersebut dikarenakan akta-akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan hukum dan akta tersebut juga memiliki akibat hukum bagi para pihak.

Bab II menguraikan tinjauan umum mengenai Notaris, Majelis Pengawas Notaris dan Sanksi bagi Notaris. Penguraian tersebut merupakan landasan untuk dapat memahami dan menganalisa pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan pada Bab I.

Bab III merupakan pembahasan untuk menjawab permasalahan pertama dari penelitian ini yaitu membahas mengenai status hukum dari akta notaris yang dicatat dalam sela-sela kosong di antara akta notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta notaris. Di dalam sub bab membahas mengenai penyebab terdegradasinya kekuatan pembuktian dan penyebab dari batalnya suatu akta notaris, kemudian dibahas mengenai akibat hukum atas akta tersebut bagi notaris dan para pihak dari aspek administrasi, perdata dan pidana.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari permasalahan yang pertama adalah Status hukum akta yang dicatat dalam sela-sela kosong di antara akta notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta notaris akan memiliki penilaian pembuktian sebagai akta di bawah tangan karena tidak memenuhi syarat formil pembuatan akta dan karena akta tersebut juga mengandung paksaan, ancaman dan penipuan (Pasal 1321 KUH Per) maka menjadi batal demi hukum. Kesimpulan dari permasalahan yang kedua adalah Akibat hukum dari akta notaris yang dicatat dalam sela-sela kosong di antara akta notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta notaris adalah adanya sanksi bagi notaris itu sendiri karena secara sengaja ikut membantu dalam memasukkan keterangan palsu dalam akta notaris tersebut sehingga notaris harus mempertanggungjawabkan tindakannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain maupun dikenakan tanggung jawab pidana yaitu Pasal 55 ayat (1) angka 2, Pasal 56 Juncto Pasal 264 ayat (1) KUHP, maka notaris akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 8 tahun. Sedangkan orang yang

menyuruh untuk memasukkan keterangan palsu akan dikenakan Pasal 266 KUHP yaitu berupa hukuman penjara paling lama 7 tahun.

Saran yang diberikan penulis adalah adanya pembaharuan Undang-undang Jabatan Notaris (UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014) yang tidak menimbulkan multi tafsir dan memiliki sanksi yang tegas bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap tugas jabatannya. Sehingga lembaga notaris akan tetap diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk melaksanakan sebagian tugas kekuasaan negara yaitu membuat akta otentik dan adanya sikap yang lebih tegas dari Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran terutama pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta notaris.

SUMMARY

This thesis analyzes the legal status and legal effect of a notarial deed recorded in the sidelines of the space between the notarial deed has been recorded in a notarial deed list.

Chapter I describes the background of the problems that originated from the deviation of the formal and substantive requirements of the procedure or procedures that notary deed notarial deed which should be an authentic deed becomes deed Antidatir (emptying number and date of the certificate so that the number and date of the certificate can be listed number and date of the deed which is not true). Furthermore, associated with the importance of a notarial deed intended to be used as evidence perfect, but because of a violation of Article 58 paragraph 2 of Law No. 30 of 2004 to provide an opportunity for the occurrence of corruption. For example, corruption money to buy land and houses where the number and date of the deed in the deed of sale is made notary is not in accordance with the actual date, but is replaced by the date when the person has not had a position. In this case the notary deed made to contain false information. Whereas notary authority granted by law to have an important role in the deed. The role is due to the deeds that made the notary has the force of law and the deed also have legal consequences for the parties.

Chapter II describes a general overview of Notaries, Notary Supervisory Council and Sanctions for Notary. The decomposition is the foundation to be able to understand and analyze the problem issues that have been mentioned in Chapter I.

Chapter III is the first study to address issues of this study is to discuss the legal status of a notarial deed recorded in the sidelines of the space between the notarial deed has been recorded in a notarial deed list. In the sub-chapter discusses the causes of degradation of the strength of evidence and the cause of the cancellation of a notarial deed, then discussed about the legal consequences of the deed to the notary and the parties of the administration, civil and criminal.

Chapter IV is the concluding chapter contains conclusions and suggestions. The conclusion of the first problem is the legal status of the deed is recorded in the sidelines of the space between the notarial deed has been recorded in a notarial deed will have a list of evidentiary assessment as a deed under the hand because it does not meet the formal requirements because the deed and the deed also contains coercion, threat and fraud (Article 1321 KUH Per) then becomes null and void. The conclusion of the second problem is the legal consequences of a notarial deed recorded in the sidelines of the space between the notarial deed has been recorded in a notarial deed is a list of sanctions for notary itself as deliberately to help in entering false information in the notarial deed so that the notary must account for actions that cause harm to others nor subjected to criminal liability, namely Article 55 paragraph (1) number 2, Article 56 Junto Article 264 paragraph

(1) of the Criminal Code, the notary will be subject to criminal sanctions in the form of a maximum prison sentence of 8 years . While people are told to enter false information will be subject to Article 266 of the Criminal Code in the form of a maximum prison sentence of 7 years.

Advice given is the author renews Notary Act (Act No. 30 of 2004 and Act No. 2 of 2014) which do not give rise to multiple interpretations and has strict sanctions for violating the notary office tasks. So the notary agency will still be given credence by the community to carry out some tasks of state power that makes authentic act and a more assertive attitude of the Supervisory Council of Notaries in monitoring and enforcing sanctions for violating notary especially violations relating to the procedures for the manufacture of a notarial deed .

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Yang Dicatat Dalam Sela-Sela Kosong Di Antara Akta Notaris Yang Telah Dicatat Dalam Buku Daftar Akta Notaris.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Pembahasan tesis ini, pada intinya mengenai akibat hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dicatat dalam sela-sela kosong di antara akta notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta notaris sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih solusi bagi masyarakat pada umumnya dan notaris pada khususnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dalam hal materi maupun segi penulisan. Sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis memohon maaf apabila dalam penulisan tesis ini masih dijumpai adanya kesalahan. Semoga diantara kekurangannya, tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir M Bisri, selaku Rektor Universitas Brawijaya periode 2014-2018.
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .
3. Bapak Dr. Iwan Permadi, S.E, S.H, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.
4. Prof. Masruchin Ruba'I, S.H, M.S., selaku pembimbing utama, atas segala kesabaran, ketelitian, bimbingan dan petunjuk yang diberikan selama proses penulisan tesis ini.
5. Bapak Hariyanto Susilo, S.H., selaku pembimbing kedua, atas segala kesabaran, ketelitian, bimbingan dan petunjuk yang diberikan selama proses

penulisan tesis ini. Serta ilmu-ilmu kenotariatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga menambah ilmu, pemahaman dan pengalaman penulis.

6. Seluruh Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan banyak ilmu dan membantu penulis sampai terselesainya studi penulis.
7. Suami dan Ayya yang selalu mendukung penulis dengan memberikan doa, waktu, pengertiannya maupun biaya selama masa studi penulis.
8. Orang tua dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan semangat bagi penulis.
9. Yulis, Dewi Cahyandari dan Rumi yang selalu menjadi sahabat dan saudara, selalu memberikan dukungan, nasehat dan doa bagi penulis. Semoga persaudaraan kita sekeluarga memberikan syafa'at untuk kita dan kekal sampai nanti. Aamiin.
10. Teman-teman Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2013 pada umumnya dan Kelas C pada khususnya. Terima kasih atas suasana kelas yang bersahabat, saling mendukung dan membantu demi mencapai keberhasilan bersama.
11. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya Mas Jumin yang selalu membantu penulis dalam hal administrasi hingga terselesainya studi penulis.

Malang, 5 Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ORISINALITAS.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	14
1.6. Kerangka Teoritik.....	24
1.6.1. Teori Pembuktian	15
1.6.2. Teori Pertanggungjawaban.....	20
1.7. Metode Penelitian.....	23
1.7.1. Jenis Penelitian.....	23
1.7.2. Pendekatan Masalah.....	24
1.7.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	25

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	26
1.8. Sistematika Penulisan.....	29
1.9. Bagan Desain Penelitian.....	31
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	32
2.1. Kajian Umum Tentang Notaris.....	32
2.1.1. Dasar Hukum.....	32
2.1.2. Pengertian Umum Notaris.....	32
2.1.3. Kewenangan Notaris.....	35
2.1.4. Kewajiban Notaris.....	39
2.1.5. Larangan Bagi Notaris.....	42
2.2. Kajian Umum Tentang Akta Notaris.....	43
2.2.1. Akta Notaris.....	43
2.2.2. Sela-sela Kosong Buku Daftar Akta.....	49
2.3. Kajian Umum Tentang Majelis Pengawas Notaris.....	51
2.3.1. Majelis Pengawas Daerah.....	54
2.3.2. Majelis Pengawas Wilayah.....	57
2.3.3. Majelis pengawas Pusat.....	59
2.4. Kajian Umum Tentang Sanksi Notaris	60
BAB III HASIL dan PEMBAHASAN.....	63
3. Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Yang Dicatat Dalam	
 Sela-sela Kosong Di antara Akta Notaris Yang Telah Dicatat	
 Dalam Buku Buku Daftar Akta Notaris.....	63
3.1. Analisis Status Hukum dari Akta Notaris yang Dicatat Dalam	

Sela-sela Kosong Di antara Akta Notaris Yang Telah Dicatat Dalam Buku Daftar Akta Notaris.....	63
3.2. Analisis Akibat Hukum Dari Akta Notaris Yang Dicatat Dalam Sela-Sela Kosong Di antara Akta Notaris Yang Telah Dicatat Dalam Buku Daftar Akta Notaris	77
BAB IV PENUTUP.....	99
4.1. Kesimpulan.....	99
4.2. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR SINGKATAN

- 1 Hlm (halaman)
- 2 HAM (hak Asasi manusia)
- 3 *Ibid (Ibidem)*
- 4 INI (Ikatan Notaris Indonesia)
- 5 KEMENKUMHAM (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
- 6 KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- 7 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- 8 *Loc. Cit. (Loco citato)*
- 9 MKN (Majelis Kehormatan Notaris)
- 10 MPD (Majelis Pengawas Daerah)
- 11 MPN (Majelis Pengawas Notaris)
- 12 MPP (Majelis Pengawas Pusat)
- 13 MPW (Majelis Pengawas Wilayah)
- 14 *Op. Cit. (Opere citato)*
- 15 PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)
- 16 UU Nomor 30 Tahun 2004 (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)
- 17 UU Nomor 2 Tahun 2014 (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DICATAT
DALAM SELA-SELA KOSONG DI ANTARA AKTA NOTARIS
YANG TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR AKTA NOTARIS**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (MKn)**



OLEH:

**YULI KRISTINA
NIM: 136010200111121**

**PROGAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**